

***LOCAL CURRENCY SETTLEMENT INDONESIA-MALAYSIA-
THAILAND DALAM KERJA SAMA KEUANGAN SUB REGIONAL***



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Departemen

Ilmu Hubungan Internasional

MUHAMMAD NUR ADNAN

E061181336

DEPARTEMEN HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

2025

HALAMAN PENGESAHAN

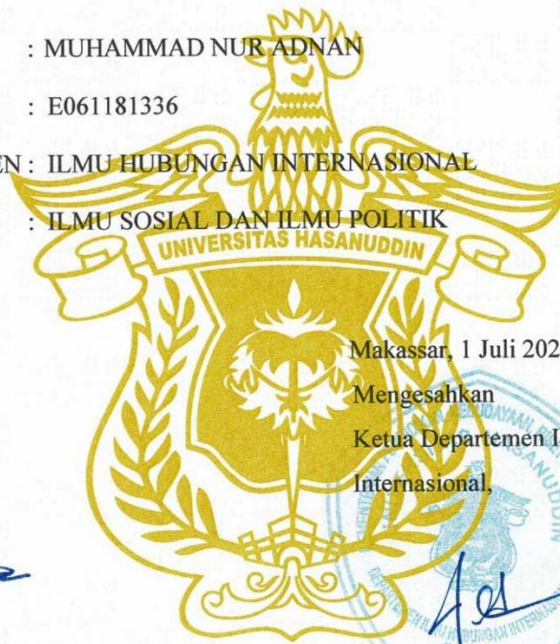
JUDUL : *LOCAL CURRENCY SETTLEMENT* INDONESIA – MALAYSIA
– THAILAND DALAM KERJA SAMA KEUANGAN SUB
REGIONAL

NAMA : MUHAMMAD NUR ADNAN

NIM : E061181336

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL


FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK




Makassar, 1 Juli 2025

Mengetahui :
Pembimbing,

Mengesahkan
Ketua Departemen Ilmu Hubungan
Internasional.


Ishaq Rahman, S.IP, M.Si
NIP 197210282005011002


Prof. Seniwati, S.Sos, M.Hum, Ph.D
NIP 1976020222000122003

HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI

JUDUL : *LOCAL CURRENCY SETTLEMENT* INDONESIA – MALAYSIA
– THAILAND DALAM KERJA SAMA KEUANGAN SUB
REGIONAL

N A M A : MUHAMMAD NUR ADNAN

N I M : E061181336

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

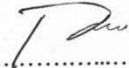
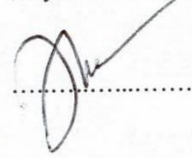
Telah diterima oleh Tim Evaluasi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar untuk memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional pada hari Selasa, 10 Juni 2025.



Ketua : Ishaq Rahman, S.IP, M.Si

Anggota : 1. Pusparida Syahdan, S.Sos, M.Si

2. Nurjannah Abdullah, S.IP, MA


.....

.....

.....

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Nur Adnan

NIM : E061181336

Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Jenjang : S1

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini dengan judul:

“Local Currency Settlement Indonesia-Malaysia-Thailand dalam Kerja Sama Keuangan Sub Regional”

Merupakan hasil karya yang saya buat sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa Sebagian atau keseluruhan skripsi ini merupakan karya orang lain, Saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 30 Juni 2025



Munaminad Nur Adnan

ABSTRAKSI

Muhammad Nur Adnan. 2018. E061181336. “Local Currency Settlement Indonesia-Malaysia-Thailand dalam Kerja Sama Keuangan Sub Regional” Pembimbing: Ishaq Rahman, S.IP., M.Si. Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Penelitian ini menjelaskan implementasi skema *Local Currency Settlement* antara Indonesia, Malaysia, dan Thailand dalam kerangka kerja sama keuangan sub regional Asia Tenggara. Fokus utama penelitian ini adalah mengkaji bagaimana penerapan *Local Currency Settlement* berkontribusi terhadap ketahanan ekonomi dan integrasi keuangan kawasan. Metode yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Data diperoleh dari dokumen kebijakan, publikasi bank sentral, serta studi relevan terkait dinamika geoekonomi dan kerja sama sub regional. Penelitian ini menunjukkan bahwa *Local Currency Settlement* tidak hanya berfungsi sebagai instrumen teknis moneter, tetapi juga sebagai strategi geoekonomi dalam memperkuat kedaulatan moneter, efisiensi transaksi, serta resistensi terhadap fluktuasi eksternal. Hasil analisis menunjukkan peningkatan signifikan dalam volume transaksi *Local Currency Settlement*, terutama antara Indonesia dan Malaysia, meskipun masih terdapat tantangan dalam aspek teknis, sosialisasi kepada pelaku usaha, dan harmonisasi kebijakan lintas negara. Kontribusi penelitian ini terletak pada upaya pengisian celah kajian mikro dan integratif, serta menawarkan perspektif strategis tentang peran *Local Currency Settlement* dalam mendesain ulang arsitektur keuangan sub regional ASEAN. Penelitian ini merekomendasikan penguatan koordinasi antar bank sentral, edukasi kepada pelaku pasar, serta perluasan partisipasi negara lain sebagai langkah lanjutan untuk mewujudkan integrasi ekonomi yang berdaulat dan inklusif di Asia Tenggara.

Kata Kunci: *Local Currency Settlement*, Sub Regional, Geoekonomi, Integrasi Keuangan, Ketahanan Ekonomi.

ABSTRACT

Muhammad Nur Adnan. 2018. E061181336. “*Local Currency Settlement Indonesia-Malaysia-Thailand in Subregional Financial Cooperation*” Advisor: Ishaq Rahman, S.IP., M.Si. Department of International Relations, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University.

This research explains the implementation of the Local Currency Settlement scheme between Indonesia, Malaysia, and Thailand within the framework of subregional financial cooperation in Southeast Asia. The main focus of this study is to examine how the implementation of Local Currency Settlement contributes to economic resilience and financial integration in the region. The research method used is descriptive-qualitative with a literature review approach. Data was obtained from policy documents, central bank publications, and relevant studies on geo-economic dynamics and sub-regional cooperation. The study reveals that Local Currency Settlement serves not only as a technical monetary instrument but also as a geo-economic strategy to strengthen monetary sovereignty, transaction efficiency, and resilience against external fluctuations. The analysis results show a significant increase in the volume of Local Currency Settlement transactions, particularly between Indonesia and Malaysia, although there are still challenges in technical aspects, outreach to businesses, and cross-border policy harmonization. The contribution of this research lies in its efforts to fill gaps in micro and integrative studies, as well as offering a strategic perspective on the role of Local Currency Settlement in redesigning the sub-regional financial architecture of ASEAN. This study recommends strengthening coordination among central banks, educating market participants, and expanding the participation of other countries as follow-up steps to achieve sovereign and inclusive economic integration in Southeast Asia.

Keywords: Local Currency Settlement, Sub Regional, Geoeconomics, Financial Integration, Economic Resilience.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkat rahmat, kekuatan dan ilmu yang diberikan sehingga tugas akhir dengan judul “*Local Currency Settlement* Indonesia-Malaysia-Thailand dalam Kerja Sama Keuangan Sub Regional” dapat selesai dan memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar sarjana dari Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna dan Penulis juga masih perlu untuk mempelajari lebih dalam tentang topik penelitian. Namun tak lupa sangat banyak kontribusi dalam penyelesaian tugas akhir ini baik dalam bentuk bantuan, dukungan, dan do’a dari berbagai pihak sejak penulis menempuh pendidikan sebagai mahasiswa hingga selesainya tugas akhir ini. Maka dari itu dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Orang tua tercinta, Ayah **Umar HR, S.Pd., M.Si.** dan Ibu **Jumria Hani**, terima kasih telah Ikhlas mendidik dan membesarkan penulis hingga menjadi pribadi seperti saat ini. Terima kasih atas segala dukungan dan do’a yang tak pernah berhenti dipanjatkan kepada penulis dalam setiap langkah. Semoga dengan adanya skripsi ini dapat membuat ayah dan ibu bangga karena telah berhasil menjadikan anak laki-lakinya menyandang gelar sarjana seperti yang diharapkan. Semoga suatu saat penulis bisa membalas

segala kebaikan dan kehangatan serta kecukupan yang selama ini telah diberikan oleh kedua orang tua penulis. Besar harapan penulis agar ayah dan ibu selalu sehat, panjang umur, dan bisa menyaksikan keberhasilan lainnya yang akan penulis raih di masa yang akan datang.

2. Saudara, **drg. Ainun Nur Arifah** dan **Kairul Anam** terimakasih atas segala dukungan moral, bantuan, dan do'a yang senantiasa membersamai penulis dalam perjalanan mahasiswa hingga penyelesaian tugas akhir ini.
3. Dosen pembimbing, **Pak Ishaq Rahman S.IP., M.Si.** Terima kasih atas kesabaran dalam membimbing penulis serta terima kasih atas segala bantuan dan masukan yang menjadikan skripsi ini dapat terselesaikan. Segala ilmu yang diberikan kepada penulis semoga dapat penulis terapkan dengan baik di masa yang akan datang.
4. Dosen-dosen departemen Ilmu Hubungan Internasional, Ibu **Prof. Seniwati, S.Sos., M.Hum., Ph.D.**, Bapak **Prof. H. Darwis, M.A., Ph.D.**, Bapak **Drs. Patrice Lumumba, M.A.**, Bapak **Alm Drs. Aspiannor Masrie, M.Si.**, Bapak **Drs. Husain Abdullah, M.Si.**, Bapak **Dr. H. Adi Suryadi Culla. M.A.**, Bapak **Drs. Munjin Syafik Asy'ari M.Si.**, Bapak **Muhammad Nasir Badu, S.Sos., M.Hum., Ph.D.**, Bapak **Burhanuddin S.IP., M.Si.**, Bapak **Agussalim S.IP., MIRAP.**, Ibu **Pusparida Syahdan S.Sos., M.Si.** Kakak-kakak dosen keren yang sekaligus menjadi teman diskusi penulis, Kak **Abdul Razaq Z. Cangara, S.IP., M.Si., MIR.**, Kak **Nurjannah Abdullah, S.IP., M.A.**, Kak **Ashry Sallatu, S.IP., M.Si.**, Kak **Aswin Baharuddin, S.IP., M.A.**, Kak **Bama Andika Putra, S.IP., MIR.**,

Kak **Biondi Sanda Sima, S.IP., M.Si., L.LM.**, Kak **Imam Fadhil Nugraha, S.IP., M.A.** Penulis sangat berterima kasih atas segala ilmu yang diajarkan selama penulis menempuh pendidikan tinggi di departemen Ilmu Hubungan Internasional baik di dalam maupun di luar kelas. Serta kepada staf departemen yang sama baik jasanya dalam melayani kebutuhan akademik penulis, **Kak Rahma, Pak Ridho, Kak Salni** terima kasih atas kesabaran dan kerja kersanya setiap hari.

5. Rekan seperjuangan **HI Angkatan 2018 FISIP Unhas**, yang telah kebersamai penulis di setiap perkuliahan. Meskipun setelah ini akan menjalani kehidupan masing-masing yang berbeda, kesibukan yang berbeda, dan mungkin berada di kota atau negara yang berbeda, semoga pertemanan ini selalu terjaga selamanya.
6. Ananaka, **Adrianya Basri, Fahri Ramlan, Muhammad Iqbal, Muhammad Iqra, Muhammad Izzulhaq, Muh Taufiqurrahman, Muhammad Iqbal, A. Muhammad Alif Rakasiwi, Ridwan Mustamin, Arjuna Rahmat Hidayat, Yusril Ansari, Sabir, Aan Andhi Trisucahyo**, Terima kasih atas segala kebersamaan dan kegembiraan yang dibagikan kepada penulis sebagai pelepas penat dari hari-hari melelahkan yang penulis alami.
7. Teman dan Sahabat, **Apt. Andi Ailzah Sartika Syain, S.Farm.**, yang telah bersedia berbagi banyak hal dengan penulis. Terima kasih selalu sabar dalam menemani, membantu, meluangkan waktunya, tenaga dan pikirannya, serta memberikan dukungan dan motivasi selama ini hingga

penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini. Semoga segala harapan baik yang direncanakan bisa terwujud dikemudian hari.

8. Teman-teman tercinta dan terkasih penulis yang sudah sabar dalam menghibur, membantu, menyemangati, hingga memberikan dukungan yang luar biasa yang tak kala spesialnya namun tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Makassar, 1 Juli 2025

Muhammad Nur Adnan

DAFTAR ISI

SKRIPSI	
HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN EVALUASI	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAKSI	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Batasan dan Rumusan Masalah	6
1.2.1. Batasan Masalah.....	6
1.2.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1.3.1. Tujuan Penelitian.....	6
1.3.2. Manfaat Penelitian.....	7
1.4. Kerangka Konseptual	8
1.4.1. Kerja sama Ekonomi Internasional	8
1.4.2. Kerja sama Sub regional	9
1.4.3. Konsep Geo ekonomi	9
1.4.4. Asumsi dan Hipotesis	10
1.5. Metode Penelitian.....	10
1.5.1. Jenis Penelitian	10
1.5.2. Teknik Pengumpulan Data.....	11
1.6. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1. Konsep Kerja sama Ekonomi Internasional	13
2.2. Konsep Kerja sama Sub Regional.....	16
2.3. Konsep Geo Ekonomi	21
2.4. Penelitian Terdahulu.....	24

BAB III GAMBARAN UMUM.....	27
3.1. Dinamika Kerja Sama Ekonomi Indonesia-Malaysia-Thailand	27
3.2. Great Power dalam kerjasama ekonomi Indonesia-Malaysia-Thailand.....	31
3.2.1. Pengaruh Tiongkok dan Implikasinya Terhadap Inisiatif LCS.....	31
3.2.2. Pengaruh Amerika Serikat dan Implikasinya Terhadap Inisiatif LCS	33
3.3. <i>Local Currency Settlement</i>	35
3.4. Dinamika Geo Ekonomi di Kawasan Asia Tenggara.....	41
BAB IV LOCAL CURRENCY SETTLEMET INDONESIA-MALAYSIA-THAILAND DALAM KERJA SAMA KEUANGAN SUB REGIONAL	49
4.1. <i>Local Currency Settlement</i> Indonesia-Malaysia-Thailand dalam Kerja Sama Sub Regional.....	52
4.2. Pengaruh <i>Local Currency Settlement</i> terhadap ketahanan ekonomi Indonesia-Malaysia-Thailand di Kawasan Asia Tenggara.....	61
4.2.1. Stabilitas Makro Ekonomi	64
4.2.2. Efisiensi Pasar Mikro Ekonomi.....	69
4.2.3. <i>Good Governance</i>	74
4.2.4. Pembangunan Sosial.....	80
BAB V PENUTUP	88
5.1. Kesimpulan	88
5.2. Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA.....	90

BAB I

PENDAHULUAN

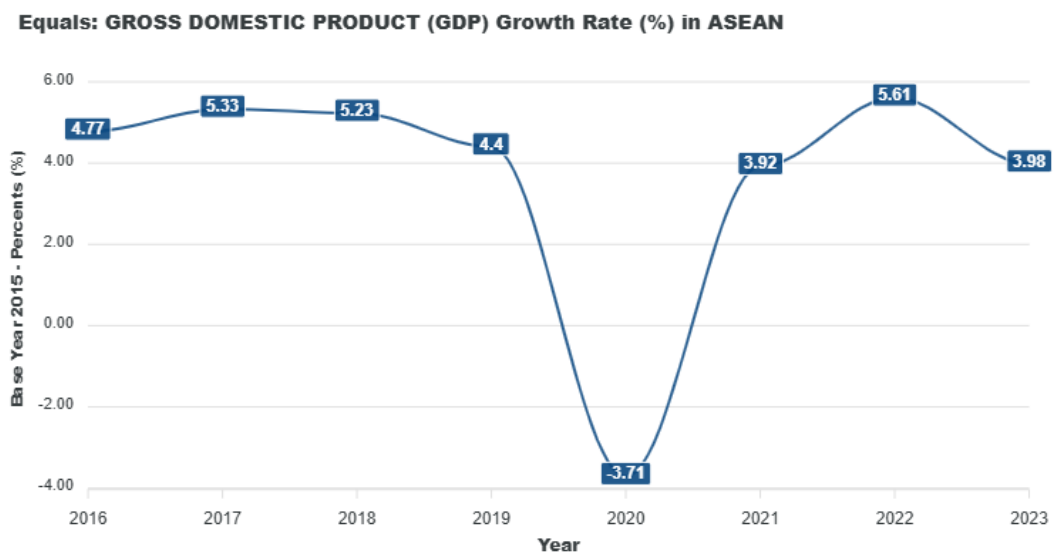
1.1. Latar Belakang Masalah

Studi ilmu hubungan internasional senantiasa membahas mengenai fenomena interaksi yang terjalin antar suatu negara dengan negara lainnya. Seiring terjadinya perkembangan zaman, fenomena interaksi yang pada awalnya hanya terbatas pada hubungan politik antar negara juga turut berkembang. Di tengah arus globalisasi yang semakin kuat, fokus kajian hubungan internasional tidak lagi terbatas pada peran negara semata. Kini, berbagai aktor non-negara turut memainkan peranan penting dalam dinamika hubungan antarnegara. Aktor-aktor ini mencakup beragam entitas seperti organisasi internasional, perusahaan multinasional, lembaga pemerintahan lintas negara, organisasi nonpemerintah berskala global, jaringan kejahatan transnasional, hingga kelompok terorisme internasional. Keterlibatan mereka mencerminkan kompleksitas baru dalam interaksi global yang menuntut pemahaman lebih luas dari perspektif hubungan internasional modern (Margono, 2015).

Dalam era globalisasi ekonomi yang semakin kompleks, ketergantungan terhadap mata uang dominan seperti dolar Amerika Serikat (USD) telah menjadi perhatian utama bagi negara-negara berkembang. Fluktuasi nilai tukar USD dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi domestik, terutama dalam konteks perdagangan regional maupun internasional (Muta'ali, 2020).

Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) sebagai wadah kerja sama regional di kawasan Asia Tenggara memiliki potensi pasar yang sangat luas, ditunjang oleh laju pertumbuhan ekonomi yang konsisten dari tahun ke tahun. Kondisi ini mencerminkan peluang yang menjanjikan bagi perkembangan ekonomi global, terutama jika ditinjau dari tren pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) negara-negara anggotanya dalam rentang waktu 2016 hingga 2023.

Gambar 1.1 Produk domestik bruto negara-negara Kawasan Asia Tenggara

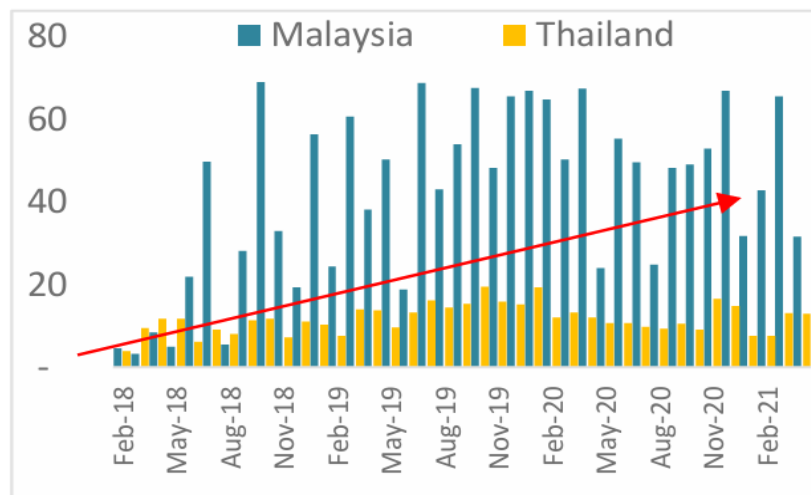


Sumber: data.aseanstats.org

Berdasarkan gambar 1.1 dapat diperhatikan bahwa PDB negara-negara di Kawasan Asia Tenggara menunjukkan kurva yang stabil dan cenderung terjadi peningkatan. Walaupun pada tahun 2020 terjadi penurunan yang signifikan dikarenakan dampak dari pandemi covid-19 yang berdampak masif bagi perekonomian global. Namun perekonomian Asia Tenggara kembali stabil pasca covid-19 usai. Hal ini menunjukkan bahwa Asia Tenggara memiliki prospek yang bagus sebagai pelaku ekonomi internasional.

Dalam rangka memenuhi kepentingan nasionalnya, setiap negara secara aktif menjalin kerja sama dengan negara lain, baik melalui jalur bilateral maupun multilateral. Di kawasan Asia Tenggara, dorongan untuk mengurangi ketergantungan terhadap mata uang asing, khususnya dolar Amerika Serikat, telah melahirkan berbagai inisiatif strategis. Salah satu upaya nyata yang telah dilakukan adalah penerapan skema *Local Currency Settlement (LCS)*, yang melibatkan Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Melalui mekanisme ini, transaksi perdagangan dan investasi antarnegara dapat dilakukan menggunakan mata uang lokal masing-masing yaitu rupiah, ringgit, dan baht. Langkah ini tidak hanya memperkuat stabilitas keuangan kawasan, tetapi juga menjadi strategi penting dalam menekan dominasi dolar AS dalam transaksi ekonomi regional (Nofansya & Sidik, 2022).

Gambar 1.2 Volume transaksi LCS THB dan MYR di Indonesia (Juta USD)



Sumber : Bank Indonesia

Menurut data yang dihimpun dari bank Indonesia, meskipun kerangka LCS telah diperkenalkan sejak 2017, penggunaannya masih terbatas. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2018, nilai transaksi LCS antara Indonesia dan Thailand hanya

mencapai sekitar 9,2 juta USD, sementara antara Indonesia dan Malaysia sekitar 22,5 juta USD. Peningkatan volume transaksi terjadi pada tahun berikutnya dimana transaksi antara Indonesia dan Malaysia meningkat hingga 49.6 juta USD pada 2019. Peningkatan volume transaksi juga terjadi antara Indonesia dan Thailand yakni 13,7 Juta USD pada tahun 2019 (Nofansya & Sidik, 2022). Angka ini sangat kecil dibandingkan dengan total perdagangan Indonesia yang mencapai hampir USD 300 miliar pada periode yang sama. Salah satu penyebab masih rendahnya penerapan LCS adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman di kalangan pelaku usaha mengenai mekanisme dan manfaat penggunaan mata uang lokal dalam transaksi internasional.

Beberapa penelitian telah mengkaji implementasi LCS di kawasan ASEAN menguraikan bahwa meskipun terdapat evolusi positif dalam penggunaan mata uang lokal pasca krisis keuangan Asia 1997-1998, implementasi LCS masih memerlukan perbaikan untuk menyesuaikan dengan total perdagangan antar negara (Farah Muthia Devi et al., 2024). Penelitian lain menunjukkan bahwa kerja sama LCS antara Indonesia, Malaysia, dan Thailand berkontribusi pada integrasi ekonomi kawasan, namun masih menghadapi tantangan dalam hal stabilitas nilai tukar dan infrastruktur keuangan. Tercatat bahwa meskipun terdapat peningkatan penggunaan LCS setiap tahunnya, ketergantungan terhadap USD masih tinggi, dan diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan stabilitas mata uang lokal dan mengurangi dominasi USD (Syifa, 2024).

Berbagai penelitian sebelumnya telah berkontribusi dalam memberikan pemahaman atas kerja sama ini, terutama dari perspektif makroekonomi dan

kebijakan moneter. Namun demikian, terdapat celah (*research gap*) yang belum banyak dieksplorasi secara mendalam. Kajian-kajian tersebut umumnya masih terbatas dalam menyoroti dinamika di tingkat mikro, seperti perilaku dan kesiapan pelaku usaha dalam merespons kebijakan LCS, kondisi infrastruktur perbankan pendukung, serta harmonisasi regulasi antarnegara yang menjadi penopang utama kelancaran transaksi lintas batas. Kurangnya perhatian pada aspek-aspek tersebut menunjukkan adanya kebutuhan akan pendekatan analitis yang lebih holistik dan kontekstual, agar kebijakan ini dapat berjalan secara optimal.

Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menyelidiki secara lebih rinci faktor-faktor mikro yang berperan dalam efektivitas implementasi LCS di kawasan Asia Tenggara, khususnya pada kerja sama antara Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Pendekatan ini diharapkan dapat memperluas pemahaman terhadap bagaimana kebijakan ekonomi regional dijelaskan dalam praktik oleh aktor-aktor lokal dan bagaimana hambatan serta peluang di tingkat operasional dapat dikelola secara strategis.

Selain itu, belum banyak penelitian yang mengkaji efektivitas LCS dalam konteks kerja sama keuangan sub regional secara komprehensif. Penelitian ini lahir atas dasar untuk mengisi celah tersebut dengan memberikan penggambaran atas implementasi LCS antara Indonesia, Malaysia, dan Thailand dalam kerangka kerja sama keuangan sub regional, serta mengidentifikasi tantangan dan peluang yang ada.

1.2. Batasan dan Rumusan Masalah

1.2.1. Batasan Masalah

Batasan masalah pada penelitian ini yakni kawasan Asia Tenggara, khususnya tiga negara yang secara resmi tergabung dalam skema LCS berdasarkan nota kesepahaman antar bank sentral yakni Bank Indonesia (BI), Bank Negara Malaysia (BNM), dan Bank of Thailand (BOT). Penelitian ini tidak akan mencakup negara-negara ASEAN lainnya seperti Singapura, Filipina, atau Vietnam yang belum tergabung dalam kerangka LCS tiga negara ini. Fokus wilayah ini dipilih mengingat ketiga negara tersebut merupakan pelopor dan implementator awal dalam kerja sama LCS sub regional yang diinisiasi sejak 2017.

1.2.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana *Local Currency Settlement* Indonesia-Malaysia-Thailand dalam kerja sama keuangan sub regional?
2. Bagaimana pengaruh *Local Currency Settlement* terhadap ketahanan ekonomi Indonesia-Malaysia-Thailand di Kawasan Asia Tenggara?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

1. Memberikan penggambaran *Local currency settlement* (LCS) antara Indonesia, Malaysia, dan Thailand dalam konteks kerja sama keuangan sub regional.

2. Memberikan penggambaran pengaruh *Local Currency Settlement* terhadap ketahanan ekonomi Indonesia-Malaysia-Thailand di Kawasan Asia Tenggara.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi internasional, khususnya dalam kajian mengenai integrasi keuangan regional dan inovasi dalam sistem pembayaran lintas negara. Penelitian mengenai *Local Currency Settlement* (LCS) masih tergolong terbatas, terutama yang mengulas secara mendalam implementasinya dalam kerangka kerja sama keuangan sub regional ASEAN. Sebagian besar kajian terdahulu masih bersifat deskriptif dan berfokus pada aspek makroekonomi atau kebijakan moneter di satu negara, tanpa melihat dinamika lintas batas dan interaksi institusional antar negara seperti Indonesia, Malaysia, dan Thailand secara komparatif. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menelaah hubungan kausal antara efektivitas LCS dan integrasi ekonomi sub regional.

Manfaat praktis yang diharapkan tercapai pada penelitian ini dampaknya terhadap integrasi ekonomi sub regional, dimana penelitian ini dapat membantu membangun kepercayaan antar negara dalam mengedepankan kolaborasi moneter tanpa bergantung pada mata uang asing. Dengan memperkuat kerangka keuangan kawasan, masyarakat di negara-negara ASEAN, khususnya di Indonesia, Malaysia, dan Thailand, akan lebih terlindungi dari gejolak nilai tukar global yang tidak menentu. Oleh karena itu,

manfaat praktis dari penelitian ini tidak hanya bersifat sektoral, tetapi juga strategis dalam mendorong kemandirian dan ketahanan ekonomi jangka panjang di tingkat regional.

1.4. Kerangka Konseptual

Pada penelitian ini, penulis mengadopsi pendekatan liberalisme sebagai sebagai garis besar dalam penelitian kali ini. Asumsi dasar dari para pemikir liberalisme seperti Adam Smith, David Ricardo, dan Maynard Keynes menganggap bahwa selalu ada bentuk saling ketergantungan baik oleh masyarakat dan masyarakat maupun ketergantungan antar satu negara dengan negara lainnya. Hal ini terjadi karena sama seperti manusia, negara juga memiliki *human nature* yang tidak dapat dipisahkan. Prinsip ini yang dalam pemikiran kaum liberalisme disebut sebagai interdependensi. Maka dari itu untuk saling memenuhi kebutuhannya, negara melakukan kerja sama dengan negara lain pada banyak sektor khususnya pada sektor ekonomi (Steans & Pettiford, 2009).

1.4.1. Kerja sama Ekonomi Internasional

Konsep kerja sama ekonomi internasional lahir lahir karena adanya kondisi berbeda yang dialami oleh setiap negara yang mengakibatkan negara memiliki potensi dan kebutuhan yang berbeda. Oleh karena itu, dalam memenuhi kebutuhan domestiknya, negara memerlukan kemampuan negara lain. Kerja sama semacam ini bertujuan menciptakan kesejahteraan kolektif atas adanya persamaan kepentingan (Muta'ali, 2020).

1.4.2. Kerja sama Sub regional

Kerja sama sub regional merupakan suatu bentuk kolaborasi yang terjadi antara negara-negara yang memiliki kedekatan geografis dan kepentingan ekonomi yang relatif serupa, namun berada dalam kerangka yang lebih sempit dibanding kerja sama regional yang lebih luas seperti ASEAN. Sub regionalisme muncul sebagai respons terhadap perlunya penguatan integrasi ekonomi yang lebih mendalam dan terfokus di antara negara-negara dengan keterikatan ekonomi yang kuat namun menghadapi tantangan bersama yang spesifik (Kawai & Wignaraja, 2010). Dalam konteks Asia Tenggara, kerja sama antara Indonesia, Malaysia, dan Thailand dalam penyelesaian transaksi keuangan dengan LCS.

1.4.3. Konsep Geo ekonomi

Geo ekonomi merupakan pendekatan analitis yang menempatkan kekuatan ekonomi sebagai instrumen utama dalam mencapai kepentingan geopolitik dan strategi nasional. Dalam kajian geo ekonomi, negara-negara menggunakan alat ekonomi seperti perdagangan, investasi, teknologi, dan sistem keuangan untuk memengaruhi perilaku negara lain atau mengamankan posisi strategisnya dalam tatanan global. Konsep ini menekankan bahwa ekonomi bukanlah ruang netral, melainkan arena yang dipolitisasi dan digunakan sebagai alat untuk memproyeksikan kekuasaan dan dominasi (Blackwill & Harris, 2016).

Dalam konteks Asia Tenggara, geo ekonomi memainkan peran penting karena kawasan ini merupakan pusat dinamika strategis antara kekuatan besar seperti Amerika Serikat dan Tiongkok. Negara-negara seperti Indonesia,

Malaysia, dan Thailand tidak hanya berupaya memperkuat stabilitas ekonomi domestik, tetapi juga membangun otonomi ekonomi kawasan dalam menghadapi tekanan eksternal, terutama dari dominasi dolar AS dalam sistem keuangan global. Pengembangan sistem LCS dapat dipahami sebagai bentuk strategi geo ekonomi sub regional untuk membangun kekuatan mandiri dan memperkuat posisi tawar dalam sistem ekonomi internasional berdasarkan aspek geografis.

1.4.4. Asumsi dan Hipotesis

Berdasarkan latarbelakang dan konsep yang penulis telah uraikan sebelumnya, penulis berasumsi bahwa kerja sama penyelesaian transaksi keuangan dengan LCS akan menunjukkan tren peningkatan yang positif dan saling menguntungkan antar negara yang terlibat kerja sama didalamnya.

Asumsi lainnya oleh penulis bahwa kerja sama LCS antara Indonesia-Malaysia-Thailand akan menumbuhkan dampak kompetitif antar negara di Kawasan Asia Tenggara. Penulis juga beranggapan bahwa LCS dapat memberikan dampak ketahanan ekonomi antar negara yang terlibat atas dinamika politik dan ekonomi yang terjadi.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis akan gunakan dalam mengobservasi fenomena dinamika yang terjadi dalam *Local Currency Settlement* yang melibatkan Indonesia, Malaysia, dan Thailand dalam kerangka kerjasama

keuangan sub regional. Maka penelitian ini akan menggunakan metode penelitian deskriptif-kualitatif.

Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian dengan temuan yang tidak diperoleh dari prosedur statistik dengan mengumpulkan data non-numerik yang kemudian digunakan untuk memahami konsep, menafsirkan peristiwa, dinamika, dan interaksi subjek berdasarkan perspektif penelitinya (Fiantika & Maharani, 2022). Oleh karena itu, penulis akan menggunakan metode penelitian deskriptif-kualitatif untuk menjelaskan fenomena *Local Currency Settlement* Indonesia-Malaysia-Thailand dalam kerja sama keuangan sub regional.

1.5.2. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian kali ini, penulis akan menitikberatkan pada *library research* (studi kepustakaan). Penulis akan mengumpulkan data dari sumber Pustaka yang memiliki kaitan dan dianggap relevan untuk dijadikan literatur penelitian berupa buku, jurnal, dan artikel yang kredibel.

1.6. Sistematika Penulisan

Berikut merupakan uraian sistematika penelitian yang akan terbagi dalam lima bab, yaitu:

BAB 1 Pendahuluan berisi latar belakang, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penilaian, dan sistematika penulisan penelitian.

BAB 2 Tinjauan Pustaka pada bagian ini akan memaparkan lebih dalam konsep maupun teori yang digunakan dalam penelitian kali ini. Hal ini penting sebagai landasan literatur dalam penelitian.

BAB 3 Gambaran Umum tentang dinamika kerja sama ekonomi masing-masing negara yang terlibat LCS.

BAB 4 Analisis dan Hasil Penelitian pada bagian ini penulis akan mengelaborasi rumusan masalah yang terdapat pada bab 1 berdasarkan literatur yang telah ditentukan pada bab 2.

BAB 5 Penutup berisi simpulan dari hasil analisis pada bab 4 sekaligus memvalidasi hipotesis yang telah diproyeksikan sebelumnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Kerja sama Ekonomi Internasional

Kerja sama ekonomi internasional merupakan suatu bentuk interaksi antarnegara yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan bersama melalui pertukaran barang, jasa, investasi, dan teknologi (Riani & Harris, 2024). Konsep ini berkembang seiring dengan meningkatnya interdependensi ekonomi global, di mana negara-negara saling bergantung dalam memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Kerja sama ini dapat berbentuk bilateral, regional, maupun multilateral, tergantung pada lingkup dan tujuan yang ingin dicapai (Muta'ali, 2020).

Konsep kerja sama ekonomi internasional mulai mendapatkan perhatian serius setelah Perang Dunia II, khususnya melalui Konferensi Bretton Woods pada tahun 1944. Konferensi ini menghasilkan pembentukan institusi-institusi penting seperti *International Monetary Fund* (IMF) dan *World Bank*, yang bertujuan untuk menciptakan stabilitas ekonomi global dan mendorong pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang (Purnomo et al., 2017).

Menurut Enrique O'Farrill setidaknya ada lima hal pokok sebagai dasar bagi negara melakukan kerja sama ekonomi internasional, diantaranya:

1. Manfaat ekonomi

Secara umum, kerja sama tradisional didefinisikan sebagai rangkaian langkah atau tindakan yang bertujuan mengoordinasikan kebijakan maupun menyatukan upaya dari berbagai pihak demi mencapai sasaran bersama di

tingkat internasional. Definisi ini masih relevan dan dianggap akurat hingga saat ini. Namun demikian, ketika diterapkan dalam konteks kerja sama ekonomi internasional, fokus terhadap tujuan tersebut cenderung mengalami penyempitan menjadi lebih spesifik. Hal ini disebabkan oleh sifat kerja sama ekonomi yang secara langsung berorientasi pada aspek-aspek ekonomi, terutama yang berkaitan dengan sektor perdagangan dan pergerakan modal lintas negara.

2. Penekanan pada hubungan antar mitra

Kepercayaan yang bersifat timbal balik menjadi landasan utama dalam menjalin kerja sama antar pihak yang terlibat. Oleh karena itu, membangun dan menjaga hubungan yang solid antara para mitra kerja menjadi kunci penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kerja sama, agar kedua belah pihak dapat meraih keuntungan bersama (*mutual benefit*). Setiap aktor yang terlibat harus menjalin relasi yang harmonis, karena bagaimanapun juga mereka dituntut untuk bekerja secara kolaboratif dan saling menguntungkan, terutama dalam hal pembiayaan bersama yang biasanya berlangsung dalam jangka menengah hingga panjang.

3. Keterlibatan sektor swasta

Kerja sama di ranah ekonomi pada dasarnya memiliki keterkaitan langsung dengan proses integrasi perdagangan, di mana kedua hal tersebut saling mendukung dalam membentuk hubungan ekonomi yang lebih terpadu antar negara. Perubahan peran negara.

4. Perubahan peran negara

Dalam konteks kerja sama ekonomi, negara memegang peranan sentral sebagai aktor utama dalam pelaksanaannya. Peran pemerintah sangat krusial untuk menjamin daya saing dan kualitas unggul di kancah internasional, salah satunya dengan mendorong kemajuan teknologi serta peningkatan kapasitas produksi nasional. Meski demikian, keterlibatan sektor swasta juga tak kalah penting. Partisipasi dunia usaha dapat memperkuat implementasi kerja sama ekonomi dan bahkan menjadi faktor kunci dalam keberhasilan proses tersebut. Dalam hal ini, pemerintah lebih berperan sebagai fasilitator sekaligus artikulator inisiatif bukan sebagai pelaksana langsung kebijakan, melainkan sebagai pihak yang menciptakan iklim kondusif agar kerja sama dapat terwujud secara optimal.

5. *Secure indirect short and medium term*

Kegiatan yang dijalankan dalam kerangka kerja sama ekonomi umumnya berfokus pada penciptaan lingkungan yang mendukung kelancaran perdagangan serta penguatan daya saing di pasar global. Oleh sebab itu, orientasi pada perolehan keuntungan ekonomi secara langsung dalam jangka pendek bukanlah karakteristik utama dari kerja sama semacam ini. Sebaliknya, untuk mencapai hasil yang maksimal, khususnya dalam bidang perdagangan internasional, dibutuhkan proses yang tidak instan melainkan bertahap seiring waktu, karena manfaat jangka panjang lebih diutamakan dalam strategi kerja sama ekonomi antarnegara (Nofansya & Sidik, 2022).

Dalam penelitian ini, konsep kerja sama internasional digunakan dengan menitikberatkan pada peran lembaga pemerintah sebagai representasi negara dalam menjalankan kerja sama. Fokus utamanya adalah pada pelaksanaan kerja sama *local currency settlement* antara Indonesia, Malaysia, dan Thailand, yang bertujuan untuk memperkuat sektor perdagangan regional. Kerja sama ini dilakukan melalui penerapan kebijakan penyelesaian transaksi perdagangan menggunakan mata uang lokal masing-masing negara.

Lebih spesifik lagi, teori ini memberikan kerangka untuk memahami tiga dimensi utama dalam penelitian ini. Pertama, aspek *institutional trust*, yakni bagaimana ketiga negara membangun kepercayaan kelembagaan dalam mengelola sistem LCS secara bersama. Kedua, *policy coordination*, yaitu bagaimana kebijakan moneter dan sistem pembayaran diharmonisasikan secara teknis dan regulatif. Ketiga, *mutual benefit*, yakni keuntungan yang diharapkan dari kerja sama ini, baik dari sisi efisiensi transaksi, penguatan nilai tukar domestik, maupun resistensi terhadap dominasi dolar. Ketiga dimensi ini merupakan inti dari teori kerja sama ekonomi internasional dan relevan secara langsung dengan fokus penelitian ini.

2.2. Konsep Kerja sama Sub Regional

Kerja sama subregional merupakan bentuk kolaborasi antarnegara yang terletak dalam satu wilayah geografis tertentu, dengan tujuan untuk memperkuat integrasi ekonomi, sosial, dan politik di antara negara-negara tersebut (Ngampramuan, 2019). Berbeda dengan kerja sama regional yang melibatkan seluruh kawasan, kerja sama subregional lebih terfokus pada wilayah yang lebih

kecil dan sering kali memiliki kesamaan dalam hal budaya, sejarah, dan tantangan pembangunan. Pendekatan ini dianggap lebih efektif dalam mengatasi isu-isu spesifik yang dihadapi oleh negara-negara dalam subregion tersebut (Kawai & Wignaraja, 2010).

Kerja sama sub regional sebagai suatu konsep dalam hubungan internasional dan ekonomi politik global mengacu pada bentuk kolaborasi antara sekelompok negara yang berada dalam wilayah geografis yang berdekatan, dengan tujuan untuk mencapai kepentingan ekonomi, politik, dan sosial bersama yang lebih spesifik dibanding kerja sama regional yang lebih luas (Zhang et al., 2019).

Subregionalisme pada dasarnya didorong oleh upaya menciptakan perdamaian, menjaga stabilitas keamanan, serta mendorong pembangunan melalui proses eksplorasi, pengenalan, dan penguatan bertahap terhadap hubungan perdagangan, ekonomi, dan budaya antarwilayah yang berdekatan secara geografis. Dengan demikian, subregionalisme dapat dipahami sebagai suatu proses kolaboratif di mana sekelompok negara menyepakati bentuk kerja sama formal di bidang ekonomi, sosial, politik, atau budaya, yang dibangun di atas dasar saling percaya dan semangat kolektif tanpa tunduk pada dominasi atau hegemoni pihak manapun (Hosen, 2019).

Konsep kerja sama subregional mulai mendapatkan perhatian pada akhir abad ke-20, seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan integrasi ekonomi yang lebih mendalam di antara negara-negara yang memiliki kedekatan geografis dan kesamaan kepentingan. Salah satu contoh awal dari kerja sama subregional adalah

pembentukan *Greater Mekong Subregion* (GMS) pada tahun 1992, yang melibatkan enam negara di Asia Tenggara dan Tiongkok bagian selatan. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan konektivitas, perdagangan, dan pembangunan ekonomi di wilayah tersebut (Ngampraman, 2019).

Dalam konteks penelitian ini, teori kerja sama subregional memberikan kerangka analitis untuk memahami dinamika hubungan ekonomi antarnegara dalam suatu subregion tertentu. Misalnya, pembentukan kerja sama *local currency settlement* antara Indonesia-Malaysia-Thailand pada tahun 2021 merupakan implementasi nyata dari konsep kerja sama subregional. Inisiatif ini bertujuan untuk mendorong pembangunan ekonomi antar negara yang terlibat.

Mengutip Chaia Siow Yue (1997) dalam tulisan Syifa (2024) dikemukakan beberapa kelebihan dari penerapan kerja sama pada level sub regional:

1. Pelaksanaan kerja sama di tingkat sub regional dapat menjadi opsi strategis ketika kerja sama ekonomi di level regional menghadapi berbagai hambatan yang menghalangi pencapaian tujuan secara menyeluruh. Kendala-kendala tersebut umumnya muncul akibat ketimpangan dalam tahapan pembangunan ekonomi antarnegara di kawasan regional, ditambah dengan perbedaan pandangan dalam sistem politik dan kebijakan ekonomi yang dianut masing-masing negara. Dalam konteks ini, kerja sama sub regional dapat berfungsi sebagai jembatan untuk memperkuat integrasi secara bertahap dengan pendekatan yang lebih fleksibel dan terfokus.

2. Implementasi kerja sama di tingkat sub regional umumnya lebih mudah dijalankan dan dikelola dari segi politik, karena sifatnya yang lebih luwes dan adaptif terhadap kebutuhan para pihak yang terlibat. Tidak adanya aturan yang terlalu ketat menjadikan kerja sama ini lebih fleksibel, sebab pengaturannya disesuaikan dengan kesepakatan bersama antar pelaku kerja sama. Meskipun cakupannya relatif kecil, kerja sama sub regional justru mampu menjadi solusi alternatif terhadap berbagai tantangan dan hambatan yang kerap muncul dalam kerangka kerja sama politik dan ekonomi di tingkat regional yang cenderung lebih kompleks dan berisiko. Meski berskala terbatas, keberhasilan kerja sama sub regional dapat memberikan model yang dapat direplikasi dan dikembangkan ke dalam kerangka kerja sama regional yang lebih luas dan menyeluruh.
3. Kerja sama sub regional berperan penting dalam mendukung para pembuat kebijakan untuk mengidentifikasi dan mengembangkan potensi pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui peningkatan konektivitas antarwilayah terutama wilayah-wilayah yang masih tertinggal agar dapat didorong menuju kemajuan yang lebih merata.
4. Kerja sama subregional yang berorientasi pada sektor ekonomi membuka peluang bagi negara-negara yang terlibat untuk saling melengkapi satu sama lain dalam aspek ekonomi (*economic complementarity*) (Syifa, 2024).

Relevansi teori kerja sama sub regional dalam penelitian ini terletak pada kemampuannya menjelaskan bagaimana Indonesia, Malaysia, dan Thailand menggunakan pendekatan kolaboratif yang terbatas namun strategis dalam

menghadapi tantangan global seperti volatilitas nilai tukar, ketergantungan terhadap dolar AS, serta ketidakseimbangan perdagangan bilateral. Ketimbang menunggu integrasi penuh dari seluruh anggota ASEAN yang memiliki tingkat kesiapan ekonomi yang berbeda-beda, ketiga negara ini memilih untuk bertindak lebih cepat melalui kerja sama sub regional yang lebih terfokus. Dalam hal ini, kerja sama sub regional berfungsi sebagai mekanisme untuk memajukan kepentingan nasional masing-masing melalui sinergi kolektif, tanpa terjebak dalam birokrasi multilateral yang kompleks (Taga & Igarashi, 2019).

Penelitian ini juga mengaitkan kerja sama sub regional dengan konsep *issue-specific cooperation*, di mana negara-negara memilih untuk bekerja sama dalam isu tertentu yang dianggap krusial dan mendesak (Ngampraman, 2019). Sistem LCS mencerminkan pendekatan ini, karena secara spesifik diarahkan untuk memperkuat efisiensi transaksi lintas batas, memperdalam penggunaan mata uang lokal, serta meningkatkan resiliensi keuangan kawasan. Ini berbeda dengan kerja sama ekonomi konvensional yang bersifat menyeluruh dan menyasar banyak sektor sekaligus.

Dengan demikian, teori kerja sama sub regional menjadi landasan teoritis yang sangat relevan dalam menjelaskan dinamika yang sedang diteliti. Ia memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana kepentingan nasional dan regional dapat bersinergi melalui mekanisme teknis yang spesifik, seperti LCS. Di sisi lain, teori ini juga membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang menentukan keberhasilan atau kegagalan kerja sama tersebut, seperti kesamaan tujuan, koordinasi institusional, dan kepercayaan timbal balik.

2.3. Konsep Geo Ekonomi

Konsep geo ekonomi muncul sebagai respon terhadap perubahan pola dominasi global pasca-Perang Dingin, di mana negara-negara mulai mengganti pendekatan geopolitik militeristik dengan strategi berbasis ekonomi. Istilah ini dipopulerkan oleh Edward N. Luttwak dalam artikelnya *From Geopolitics to Geo-Economics: Logic of Conflict, Grammar of Commerce* pada tahun 1990. Luttwak berargumen bahwa dinamika kekuasaan antarnegara semakin ditentukan oleh kemampuan menggunakan instrumen ekonomi secara strategis dalam kerangka konflik non-militer (Luttwak, 1999)

Geo ekonomi, dalam pandangan Luttwak, merupakan perpaduan antara logika geopolitik yang menekankan kekuasaan dan kontrol wilayah dan mekanisme ekonomi pasar. Perubahan ini tidak menghapuskan konflik, tetapi mengubah wujudnya dari konfrontasi militer menjadi persaingan melalui kebijakan fiskal, kontrol perdagangan, investasi strategis, dan pengaruh mata uang. Dalam konteks ini, kekuatan ekonomi menjadi alat untuk mencapai tujuan politik (Luttwak, 1999).

Definisi geo ekonomi lain dikemukakan oleh Clayton dan kawan-kawan (2023) yang memaknai geo ekonomi sebagai suatu strategi di mana pemerintah memanfaatkan kekuatan teritorial negaranya dalam konteks transaksi keuangan dan perdagangan untuk mencapai tujuan-tujuan geopolitik maupun ekonomi (Mohr & Trebesch, 2024).

Perkembangan konsep geo ekonomi semakin diperdalam oleh pemikir-pemikir seperti neoliberal lain yang mendefinisikan geo ekonomi sebagai penggunaan

instrumen ekonomi dan aspek kewilayahan untuk memajukan dan mempertahankan kepentingan nasional serta menghasilkan hasil geopolitik. Di sini terlihat bahwa geo ekonomi bukan hanya fenomena pasar, tetapi sebuah bentuk *statecraft* yaitu seni mengelola hubungan internasional melalui ekonomi sebagai alat utama (Blackwill & Harris, 2016).

Seiring globalisasi dan transformasi digital, geo ekonomi berkembang dari sekadar kebijakan negara terhadap mitra strategisnya menjadi platform regional. Perhatian geo ekonomi kini mencakup pengaruh sistem moneter, dominasi infrastruktur keuangan, dan mekanisme transaksi lintas batas yang semakin terhubung dengan lokasi geografis dan struktur regionalisasi.

Aspek geografis menjadi dimensi yang tidak terpisahkan dalam analisis geo ekonomi. Wilayah yang secara geografis strategis memiliki keunggulan struktural dalam membentuk jaringan ekonomi regional. Dalam konteks Asia Tenggara, kedekatan geografis antara Indonesia, Malaysia, dan Thailand menciptakan potensi besar untuk integrasi ekonomi sub regional yang efisien, yang kemudian menjadi dasar terbentuknya inisiatif seperti *Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle* (IMT-GT) dan kebijakan yang menjadi subjek dalam penelitian ini yaitu *Local Currency Settlement* (LCS).

Aspek geografis merupakan elemen kunci dalam pendekatan geo ekonomi, karena penempatan spasial suatu wilayah sangat menentukan nilai strategisnya dalam percaturan ekonomi global. Hal ini tercermin dalam karya Erik Grove (1990) *the future of sea power* yang menyatakan bahwa tidak ada kekuatan ekonomi yang

bebas dari konteks geografisnya. Posisi strategis seperti berada di jalur perdagangan internasional, dekat dengan sumber daya alam utama, atau menjadi titik konektivitas logistik, semuanya merupakan modal geo ekonomi (Herbanu & Soediantono, 2022).

Dalam konteks ini, wilayah yang memiliki nilai geografis tinggi akan lebih mudah diintegrasikan ke dalam jaringan ekonomi global atau bahkan menjadi titik persaingan antara kepentingan-kepentingan besar. Negara-negara atau entitas ekonomi akan berusaha mengoptimalkan posisi geografis tersebut untuk meningkatkan daya saing, menarik investasi, atau mengendalikan aliran barang dan jasa.

Geo ekonomi tidak sekadar beroperasi pada level makro-negara, melainkan juga menyentuh tata ruang wilayah, perencanaan infrastruktur, hingga strategi pembangunan kawasan. Proyek-proyek infrastruktur besar di Asia Tenggara bukan hanya berbasis pada kebutuhan ekonomi, tetapi juga mengandung perhitungan geo ekonomi yang mempertimbangkan akses wilayah, stabilitas politik lokal, dan potensi kontrol terhadap jalur perdagangan (Glassman, 2011).

Penelitian ini menggunakan teori geo ekonomi sebagai kerangka teoritik utama dengan menitikberatkan pada dimensi geografis dari fenomena yang diteliti. Fokus penelitian yang menyangkut perihal kewilayan dalam hal ini LCS dalam kontek kerja sama keuangan sub regional menempatkan lokasi geografis sebagai variabel yang menentukan dalam pembangunan ekonomi dan strategi kebijakan.

Dengan menggunakan pendekatan geo ekonomi, penelitian ini menganalisis bagaimana posisi geografis dari wilayah yang diteliti menjadi faktor kunci dalam perencanaan pembangunan, investasi strategis, atau bahkan dalam perebutan pengaruh antara aktor-aktor ekonomi. Sebagai contoh, jika wilayah suatu negara berada di jalur laut internasional, maka tidak hanya memiliki potensi ekonomi, tetapi juga menjadi objek geo ekonomi dari berbagai aktor regional.

Geo ekonomi juga memberikan kerangka untuk memahami mengapa strategi pembangunan di wilayah tertentu tidak semata-mata bertumpu pada kalkulasi ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan aspek ketahanan nasional, daya tarik investasi asing, dan penguatan posisi dalam peta perdagangan global. Maka dari itu geo ekonomi mengintegrasikan rasionalitas ekonomi dan geografis dalam satu kesatuan strategi (Scholvin & Wigell, 2018).

2.4. Penelitian Terdahulu

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas aspek-aspek spesifik dari LCS Indonesia-Malaysia-Thailand, namun penelitian ini menawarkan pendekatan yang lebih holistik dan strategis, yang menjadikan kontribusinya bersifat orisinal dan signifikan.

Pertama, penelitian oleh Farah Muthia Devi, Muhammad Sultan Ibrahimovic, Sutisna, Natasha Putri Fedenan dalam jurnal *EBISMEN* membahas evolusi penggunaan mata uang lokal dalam kerja sama ASEAN, dengan fokus historis pada ketergantungan terhadap dolar AS pasca krisis 1997 dan 2016. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam melihat tren makro penggunaan LCS, tetapi belum

menyentuh secara mendalam dimensi geo ekonomi atau kerangka kerja sub regional secara strategis (Farah Muthia Devi et al., 2024).

Kedua, Hadi Nur Muta'ali memfokuskan pada kepentingan nasional Indonesia, Malaysia, dan Thailand dalam membentuk kerangka LCS. Penelitiannya menyoroti alasan kebijakan dan peran bank, namun belum mengulas bagaimana LCS beroperasi dalam bingkai kekuatan geo ekonomi dan transformasi sub regionalisasi keuangan di ASEAN (Muta'ali, 2020).

Ketiga, penelitian oleh Aldy Nofansya dan Hasan Sidik yang meneliti perihal penguatan kerangka LCS dapat mendorong perdagangan Indonesia-Malaysia-Thailand, tetapi pendekatannya lebih berfokus pada solusi teknis (seperti peran stakeholder dan awareness pelaku usaha), bukan pada dinamika struktur kekuatan ekonomi regional dan motif strategis negara-negara pelaku (Nofansya & Sidik, 2022).

Keempat, Safina Rahma Syifa dalam *Jurnal Wahana Pendidikan* menyoroti LCS sebagai instrumen menuju integrasi ekonomi ASEAN. Meskipun menyentuh konsep sub regionalisme, penelitian ini belum mengeksplorasi secara argumentatif bagaimana kerja sama LCS berfungsi sebagai arena geo ekonomi di tengah dinamika global (Syifa, 2024).

Kelima, skripsi Dhiya Fadhilah Rakhman tentang prospek LCS Indonesia-Tiongkok menawarkan pendekatan geo ekonomi secara eksplisit, tetapi fokusnya pada kerja sama bilateral Indonesia–RRT dalam konteks Indo-Pasifik, sehingga

belum membahas dinamika intra-ASEAN yang menjadi fokus penelitian ini (Rakhman, 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam implementasi dan dinamika kerja sama *Local Currency Settlement* (LCS) antara Indonesia, Malaysia, dan Thailand dalam konteks kerja sama keuangan sub regional. LCS merupakan kebijakan strategis yang dirancang untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS dalam perdagangan lintas batas dengan memfasilitasi penggunaan mata uang lokal negara mitra. Dalam konteks ini, ketiga negara tidak hanya membentuk kerangka teknis transaksi bilateral, tetapi juga secara substansial membangun tatanan keuangan baru yang lebih independen dan terdesentralisasi di kawasan Asia Tenggara.

Penelitian ini menekankan pada pendekatan geo ekonomi dan sub regionalisme, yang mengaitkan strategi ekonomi dengan kepentingan geopolitik dan integrasi regional. Dalam hal ini, LCS tidak diposisikan hanya sebagai instrumen teknis moneter, melainkan sebagai alat kebijakan luar negeri ekonomi (*economic statecraft*) untuk memperkuat kedaulatan moneter, meningkatkan daya tawar kawasan, dan memperluas pengaruh ekonomi dalam kerangka ASEAN. Oleh karena itu, penelitian ini menyoroti LCS dari berbagai dimensi: institusional, geo ekonomi, integratif, dan praktis, guna memahami dampaknya dalam mendesain ulang arsitektur keuangan sub regional.